



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RISKHA AMALLIA INDRIAWATI**
2. Jabatan : **AUDITOR MUDA**
3. NHK : **889663**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.469.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/100 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/300 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 125.000.000		
3. Tanah Seluas 3.900 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 390.000.000		
4. Tanah Seluas 4.545 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 454.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	153.000.000
1. MOTOR, HONDA D1B02N261.2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA B6H A/T / SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
3. MOBIL, HONDA BRIO DDR 1.3 E A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	27.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	900.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.650.900.000



III. HUTANG

Rp. 265.427.007

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.385.472.993

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.